

**ANALISIS PERAN BANTUAN PENDIDIKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) GUNA
MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**PATIA SOPA
NPM. 1451010088**

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**ANALISIS PERAN BANTUAN PENDIDIKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
GUNA MENIGNKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Pembimbing II : Is Susanto M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional, akan tetapi masalah kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan. Sehingga untuk meminimalisir masalah kemiskinan pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program perlindungan sosial yang dibuat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan berfokus pada pengembangan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan. Perannya dalam memberikan bantuan akan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan memperbaharui tingkat Partisipasi Sekolah penerimanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran PKH guna meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur? Dan bagaimana menurut pandangan Ekonomi Islam tentang Peran PKH guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran PKH dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur dan pandangan Ekonomi Islam Peran PKH Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini sebanyak 332 peserta dan sampel sebanyak 34 peserta. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisa data penulis menggunakan analisa dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Karang Timur kurang berjalan dengan baik dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, hal ini dikarenakan masih ada beberapa peserta PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah tidak berjalan dengan baik. Sedangkan Peran PKH guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial), pemerintah sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memberikan bantuan untuk kemaslahatan masyarakatnya, sedangkan tanggung jawab dari masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Sedangkan dalam hal jaminan sosial (*takaful*), kesadaran pemerintah akan pendidikan dan kesehatan sudah tinggi sehingga pemerintah membuat program-program yang menjamin peningkatan kualitas SDM yang salah satu programnya adalah PKH.

Kata Kunci: Peran PKH, Bantuan Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : PATIA SOPA

NPM : 1451010088

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 198008012003121001

Pembimbing II,

Susanto M.E.Sy.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M. Si.

NIP. 19750424200212100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PERAN BANTUAN PENDIDIKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) GUNA MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)"** di susun oleh Patia Sopa, NPM: 1451010088, Jurusan: Ekonomi Syaria'ah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 17 Desember 2018.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. H. Nasruddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Linda Azizah, M.Ag. (.....)

Penguji I : H. Supaijo, S.H, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)



DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mub. Bahrudin, M.Ag.
No. 195808241989031003

MOTTO

At-Thatghabun ayat 15

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponogoro, 2011) hlm. 445



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tinggal & ibu Fatimah yang selalu berjuang demi cita-cita dan mimpi anaknya, terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan, kakak-kakaku Shobirin, Saipul, Suheri dan adikku tercinta Suherdiyansyah yang selalu memberikan semangat, serta bibiku tersayang bibi Neni yang sangat amat membantu dalam penelitian ini. semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada kalian Aamiin.
3. Sahabat-sahabatku tersayang Selviana Ramadhani, Eka Juliana, Rohimah, Indah Apriliani, Zainur Rosidah, Desi Setiawati, Meiana Nirmala Sari, Gita Ayu, Resi Marlia Sari, Intan Suri dan Murni Retiwiranti. terimakasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
4. Teman-teman Seperjuanganku Ekonomi Islam D, teman-teman KKN 255, dan Ekonomi Syariah angkatan 2014,
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Patia Sopa, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 1996, anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Tinggal dan Ibu Fatimah. Bertempat tinggal di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

1. Penulis mengawali pendidikan di Mandrasah Ibtidaiyah Al-Jauharotun Naqiah Kota Baru Bandar Lampung pada tahun 2002-2008
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP UTAMA 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2011
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK UTAMA Bandar Lampung selesai pada tahun 2014
4. Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian inidengan judul **“Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Dalam upaya untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Madnasir, S.E., M.SI. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswanya dalam pengajaran yang baik.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. sebagai pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan masukan-masukan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi. Bapak Is Susanto M.E.Sy. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Cucu, Mba Eli, Mba Keni. selaku Kepala pendamping dan pendamping PKH beserta jajarannya yang telah terlibat memberikan sumber data serta informasi yang akurat dan Para Ibu-ibu penerima PKH yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, akan mendapat balasan kebaikan yang lebih

besar disisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2018

Penulis,



Patia Sopa
NPM : 1451010088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Tinjauan Pustaka	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)	
1. Pengertian dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	25

2. Kreteria dan Kewajiban Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	28
3. Besaran Bantuan Dan Mekanisme Bantuan Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH)	35
B. Konsep Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
1. Definisi Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	36
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	37
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	38
C. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)	
1. Teori Peran	41
2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)	43
D. Konsep Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam	45
2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam	47
3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam	51
4. Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Ekonomi Islam	53
5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Ekonomi Islam	58

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Kecamatan Tanjung Karang Timur	63
2. Letak Dan Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur	64
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	64
B. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tanjung Karang Timur	
1. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH).....	67
2. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	69

3. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)	73
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Di Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	80
B. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Peserta PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur	13
Tabel 2 : Usia Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur	65
Tabel 3 : Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	65
Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Timur	66
Tabel 5 : Mata Pencaharian Kecamatan Tanjung Karang Timur	67
Tabel 6 : Besaran Dana Bantuan	71
Tabel 7 : Penduduk Usia 7-12 Tahun	77
Tabel 8 : Peserta Didik SD/MI Sederajat	77
Tabel 9 : Penduduk Usia 13-15 Tahun	78
Tabel 10 : Peserta Didik SMP/MTS Sederajat	79
Tabel 11 : Penduduk Usia 16-18 Tahun	79
Tabel 12 : Peserta Didik SMA/MA Sederajat	80
Tabel 13 : Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat	89
Tabel 14 : Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS Sederajat	90
Tabel 15 : Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA Sederajat	91
Tabel 16 : APK SD, SMP Dan SMA Sederajat Di Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2016	92
Tabel. 17 : Data anak tidak bersekolah penerima PKH di Kecamatan Tanjung Karang Timur	93
Tabel. 18: Target Yang Ingin Di Capai Di Provinsi Lampung	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Berita Acara Munasqasyah
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin Pra-Riset FEBI UIN Lampung
- Lampiran 6 : Surat Izin Riset FEBI UIN Lampung
- Lampiran 7 : Surat Kesbangpol Provinsi Lampung
- Lampiran 8 : Surat Kesbangpol Kota Bandar Lampung
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian Di Kecamatan Tanjung Karang Timur
- Lampiran 10: Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 11 : Pedoman Wawancara Untuk Pendamping PKH
- Lampiran 12 : Pedoman Wawancara Untuk Peserta PKH
- Lampiran 13 : Daftar Nama Peserta PKH
- Lampiran 14 : Dokumentasi Dengan Peserta PKH
- Lampiran 15 : Surat Konsultasi Pembimbing Akademik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul : “Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Dalam hal ini analisis yang dimaksud usaha untuk mengamati sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut.

¹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), h .44.

2. Peran

Peran adalah proses dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan.² Peran yang dimaksud adalah peran dari PKH itu sendiri.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*), dimana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajiban.³ Program keluarga harapan selanjutnya akan disingkat menjadi PKH.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.⁴ Angka partisipasi sekolah yang dimaksud meliputi bidang pendidikan yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan luas.⁵

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.54

³ TNP2K, *Program Keluarga Harapan*, Artikel 2014, h. 1

⁴ BPS. *Jumlah Penduduk Miskin*. (On-Line) tersedia di <http://www.bps.go.id>, (Diakses: 09 April 2018)

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Seti, 2013) h.249

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, dan harta)⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian atau kajian tentang kedudukan sebuah program bantuan tunai bersyarat yakni PKH dimana salah satu kebijakannya adalah meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dimana dalam hal ini penulis akan melihat dalam perspektif ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif

a. Umum

Untuk memutus rantai kemiskinan dibutuhkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan, karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Akan tetapi kemiskinan adalah penyebab banyaknya anak bangsa yang tidak

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h.6

dapat memperoleh pendidikan, oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat (2): “diberinya setiap warga negara hak untuk memperoleh pendidikan”.⁷

b. Khusus

PKH merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk perlindungan sosial yang memberikan uang tunai bersyarat yaitu Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan, kepada rumah tangga miskin (RTM). Setelah diadakan observasi di Kecamatan Tanjung Karang Timur maka diketahui bahwa banyaknya penerima PKH yang kurang mengetahui tujuan khusus PKH, sehingga dampak pada pemanfaatan bantuan (dana) yang diberikan kurang maksimal.

2. Alasan Subjektif

Karena pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan kajian keilmuan penulis pelajari di jurusan ekonomi Islam, serta adanya bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

⁷ Tim Pengembang Ilmu Fip-Upi, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta:PT Imperial Bhakti Utama, 2007), h.32

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan dikatakan dapat mempengaruhi pendapatan seseorang dimasa yang akan datang dan dipercaya menjadi kunci dari suatu pembangunan ekonomi serta dianggap sebagai investasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.⁸

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Kemajuan dan kemandirian adalah hal-hal yang diperlukan bagi ketangguhan dan keuletan bangsa. Kemajuan dan kemandirian ini merupakan modal bangsa untuk tetap unggul dalam percaturan masyarakat internasional.⁹

Islam mengajarkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, hal itu hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan.¹⁰ Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh

⁸ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h.138.

⁹ Nurul Fatma Hasan, *Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan*, Jurnal Studi PGMI, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2017), h.1-2

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.29-31

karena itu, islam memberikan perintah secara tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu (*thalabul 'ilm*).¹¹ Seperti sabda Rasul SAW tentang kewajiban menuntut ilmu.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابو داود)

Artinya : *Bersumber dari Anas bin Malik ra. Ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. (HR. Abu Dawud).*¹²

Betapa pentingnya pendidikan, karena dengan proses pendidikanlah manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang mulia, melalui pemberdayaan potensi dasar dan karunia yang telah diberikan Allah. Apabila semua itu dilupakan dengan mengabaikan pendidikan, manusia akan kehilangan jati dirinya. Firman Allah yang kaitannya dengan pentingnya pendidikan bagi umat. Allah SWT berfirman (QS. At-Taubah: 122)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semua (ke medan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”

¹¹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013). h.7

¹² Labib, *Terjemah Ikhtisar Hadis Abu Daud*, (Surabaya: Tiga Dua, 1996), h.222

Ayat ini merupakan penjelasan dari Allah SWT bagi berbagai golongan penduduk Arab yang hendak berangkat bersama Rasulullah SAW. Ulama salaf berpendapat bahwa semua golongan dari penduduk Arab yang muslim wajib berangkat perang. Kemudian sekian golongan itu harus ada orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW. Guna memahami agama lewat wahyu yang diturunkan kepadanya, kemudian mereka dapat memperingatkan kaumnya apabila mereka telah kembali, yakni ihwal persoalan musuh, jadi dalam pasukan itu ada dua kelompok: kelompok yang berjihad dan kelompok yang mendalam agama melalui rasul.¹³

Maksud ayat di atas adalah tidak seyogyanya seluruh kaum muslimin berjihad. Tetapi hendaknya ada sebagian yang tinggal dan menuntut ilmu dan mendalam agama Allah agar menjadi pengajar dan pembimbing bagi lainnya ketika mereka kembali dari medan perang.¹⁴

Menyadari pentingnya pendidikan bagi suatu individu, masyarakat, bahkan bagi pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan bagi suatu Negara, Indonesia sebagai Negara berkembang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini mengingat peningkatan kualitas manusia yang menjadi

¹³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terjemahan syihabuddin (Depok: Gema Insani, 2007), h.684-685

¹⁴ Musthafa Dieb, Muhyidin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014). h.70

subjek pembangunan agar siap berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan juga berfungsi mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi anggota masyarakat yang produktif. Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Upaya memenuhi kebutuhan hidup ini dilakukan dengan upaya memperoleh penghasilan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti melalui bekerja atau berproduksi. Untuk ini perlu keterampilan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan.¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan oleh sebab itu merupakan tugas negara untuk melaksanakan pembangunannya.¹⁶

Masalah kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan menjadi angan-angan saja. SDM yang tersedia di Indonesia sangat melimpah, Namun melimpahnya sumber daya manusia tidak diimbangi dengan kualitas dari sumber daya manusianya. Jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

¹⁵ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009), h.58-59

¹⁶ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009), h. 200

rendah dan sempitnya kesempatan kerja adalah akar dari permasalahan kemiskinan.¹⁷ Hal ini akan mengakibatkan terjadinya rantai kemiskinan.

Untuk meminimalisir kemiskinan maka pemerintah melalui kementerian sosial mengeluarkan program-program untuk pengentasan kemiskinan serta perlindungan sosial. Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan.¹⁸

Program-program pendidikan pada umumnya menampung keinginan atau kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pada gilirannya, tersedia manusia inovatif serta lembaga-lembaga yang kondusif untuk meningkatkan mutu kehidupan, kedua-duanya menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil, nifas, atau menyusui, atau anak balita atau pra sekolah, atau memiliki anak yang masih

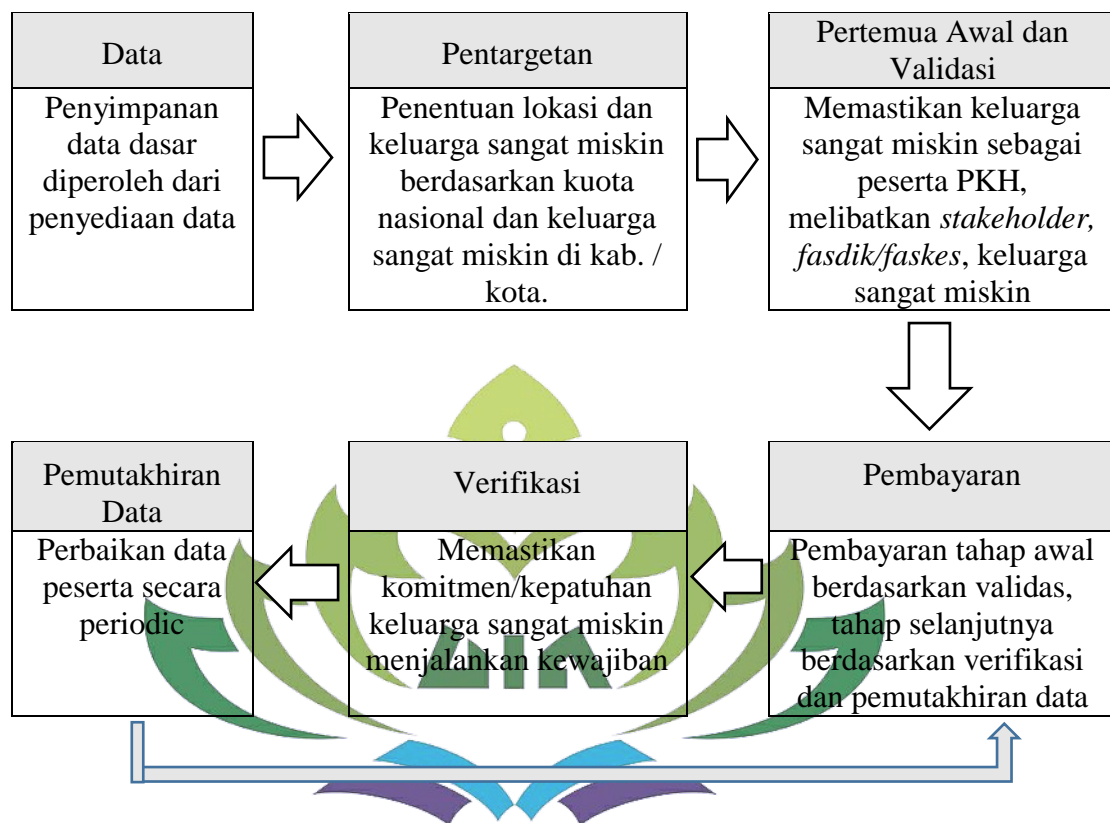
¹⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke 05*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015), h.337

¹⁸ Dedy Utomo, et.al. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2, No.1. h.29

¹⁹ H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2012), h.405

bersekolah di tingkat SD atau SMP sederajat, anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.²⁰

Mekanisme Pelaksanaan PKH²¹



Ketika PKH diluncurkan pada tahun 2007, penerima manfaat program yang dipilih merupakan rumah tangga yang sangat miskin yaitu mereka yang berada di bawah 80 persen garis kemiskinan resmi saat itu. Karena program ini merupakan program rintisan, cakupan awalnya pun sangat rendah. Hingga tahun 2012, program ini hanya menjangkau 1,5 juta keluarga, dibanding total 60 juta keluarga miskin di Indonesia serta sekitar 6,5 juta keluarga yang

²⁰ TNP2K, *Op. Cit.*, h.1

²¹ Bambang Widianto, *Kebijakan TNP2K Dalam Pengelolaan Data Terpadu Yang Mendukung Strategi Transformasi PKH*, (Tangerang: Deputi Seswapres Bidang Sekra Dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K, 2012), h. 15

berada di bawah garis kemiskinan. PKH diharapkan mampu menjangkau lebih banyak rumah tangga miskin di tahun-tahun selanjutnya.²²

Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RSTM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka partisipasi sekolah (APS) terdiri dari dua jenis pengukuran yaitu angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK). Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu bila APM mengukur perbandingan antara Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan APK mengukur Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Pada studi ini data partisipasi sekolah yang digunakan adalah data APK agar mencakup secara keseluruhan penduduk yang berpartisipasi pada tingkat pendidikan dasar (SD, SMP, dan SMA sederajat). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program

²² Suahasil Nazara, Sri Kusumastuti Rahayu, *Program Keluarga Harapan*, TNP2K, Oktober 2013, h.1

pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.²³

Di provinsi Lampung PKH baru berjalan pada tahun 2011, dan pada tahun 2016 PKH sudah menyentuh di 15 kabupaten/kota, 227 kecamatan, dan 2.923 desa atau kelurahan. Adapun jumlah KPM sebanyak 220.561 keluarga. Dana yang telah disalurkan dari tahun 2011 sampai dengan tahap ke-4 di tahun 2016 sebesar Rp 900 miliar. dengan jumlah pendamping sebanyak 898 orang, operator kabupaten atau kota sebanyak 70 orang, 15 orang koordinator kabupaten atau kota, dan 4 operator provinsi.²⁴ Warga Kecamatan Tanjung Karang Timur salah satu yang mendapat bantuan PKH tersebut. Di Kecamatan Tanjung Karang Timur, RSTM yang menerima harus melakukan persyaratan yang diberikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya dibidang pendidikan dan kesehatan memenuhi, serta masuk kedalam salah satu komponen penerima PKH yaitu:

Kreteria penerima PKH yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memiliki 6 komponen antara lain:

1. Anak Usia SD
2. Anak Usia SMP
3. Anak Usia SMA
4. Ibu Hamil / Balita
5. Disabilitas Berat
6. Lansia > 70 Tahun

²³ Niken Ajeng Lestari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah”. (Tesis Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014). h.5-6

²⁴ Dinas Sosial Salurkan PKH 15 Daerah, (On-line) Diakses di: <http://www.lampost.co> (Diakses: 22 Maret 2018)

Tabel 1
Jumlah Peserta PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur

NO	Komponen	Jumlah Penerima PKH
1	Anak Usia SD	162
2	Anak Usia SMP	53
3	Anak Usia SMA	77
4	Ibu Hamil/ Balita	13
5	Lansia > 70 tahun	25
6	Disabilitas Berat	2
Jumlah		332

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur

Program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Karang Timur tidak terlepas dari berbagai masalah, menurut pra survey yang peneliti lakukan, masih adanya warga yang tidak mendapatkan bantuan ini meski warga tersebut termasuk ke dalam syarat penerima, selain itu masih adanya anak dari penerima PKH yang tidak sekolah sementara program ini mengharuskan anak untuk di masukan ke sekolah atau mengejar ketertinggalan dengan mengikuti paket A (Setara SD), paket B (Setara SMP), atau Paket C (Setara SMA).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran PKH Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Di Kecamatan Tanjung Karang Timur?

2. Bagaimana Peran PKH guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran PKH guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- b. Untuk Mengetahui peran PKH guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai peran dana bantuan PKH dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Dan diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian yang berkaitan serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya.
- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai tujuan yang ingin dicapai dari PKH serta pemerintah mengenai peran dari PKH itu sendiri dalam bidang pendidikan khususnya di Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami dan mangantisipasi masalah.²⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian lapangan tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjukan dengan menggunakan kepustakaan²⁷ sebagai penunjang dan jenis penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁸ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di kecamatan tanjung karang timur.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2015).h.122

²⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014), h.3

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 96

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalilia Indonesia, 2012), h.11

- 2) Penelitian perpustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bacaan yang sesuai dengan pokok bahasa, kemudian disaring kembali kedalam pemikiran teoritis.²⁹ berbagai literatur digunakan seperti: data dari pihak kecamatan, dinas sosial, Al-Qur'an serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*deskriptif research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.³⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

²⁹ *Ibid*, h.5

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 206

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi.³¹ dimana pemilihan informasi dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang telah dikumpulkan dengan pihak lain. Data diperoleh dari kepustaakaan, studi dokumentasi atau dari laporan peneliti terdahulu yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.³² Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari tokoh masyarakat di kecamatan dan ketua serta pendamping PKH.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji.³³ Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah seluruh peserta PKH yang ada di kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu sebanyak 332 peserta PKH.

³¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi 4*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 145.

³² *Ibid.*

³³ Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h.2

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto. Yaitu berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.³⁴

Mengingat jumlah populasi lebih dari 100 penerima PKH, sehingga ditetapkan jumlah sampel sebesar 10% yaitu $332 \times 10\% = 33,2 = 34$ penerima PKH

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 masyarakat, untuk menggunakan ukuran sampel penulis menggunakan *non random sampling* artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel, teknik yang digunakan penulis jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Dengan demikian ciri-ciri yang dapat dijadikan sampel adalah masyarakat penerima PKH yang memiliki tanggungan anak sekolah yang berkelanjutan.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.134

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya, yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁵ Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat kejadian yang sebenarnya dilapangan, metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang peran PKH.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.³⁶ Data ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran PKH.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya

³⁵ Sugiono, *Op. Cit.* h 145

³⁶ *Ibid*, h.137

monumentas dari seseorang.³⁷ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data yaitu dengan menimbang, menyaring dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasi yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekomendasi data (*reconstructing*), yaitu menyusun data secara teratur dan berulang sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistemastika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan jenis deduktif yaitu proses

³⁷ *Ibid*, h.240

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004)

h. 126

³⁹ Sugiono, *Op. Cit*, h.243

secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian yang bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum kemudian menyebarkan hal khusus.

Dalam penelitian ini data yang didapat peneliti kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam peran PKH dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai PKH, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Deylia Carolina Bangun, dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto”* penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi anak rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sejauh ini masih belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sooko. Kinerja dari para pendamping pun dinilai masih sangat kurang dalam menangani beberapa persoalan yang ada di lingkungan anggota RTSM. Jika saja Program ini dapat dijalankan dengan baik

tentunya akan sangat menguntungkan bagi anak RTSM dan juga bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan terutama dalam dunia pendidikan.⁴⁰

2. Melviona, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batang Peranap masih belum optimal karena belum berjalan sesuai dengan tujuan nya. Dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima. Belum optimalnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Batang Peranap dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat yakni berupa kurang nya sosialisasi dari pihak kecamatan Batang Peranap, dan kurangnya Partisipasi dari Masyarakat. Faktor-Faktor penghambatnya yang mana sosialisasi program keluarga harapan (PKH) lebih gencar lagi sehingga masyarakat Kecamatan Batang Peranap menegetahui bahwa ada program bantuan untuk masyarakat miskin yang bernama program keluarga harapan.⁴¹

3. Rusydi, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya*

⁴⁰ Deylia Carolina Bangun, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto*, Paradigma. Volume 04 Nomer 01 Tahun 2016.

⁴¹ Melviona, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*, (Jom FISIP Vol. 4 No 2 Oktober 2017), h.12

Kabupaten Pidie” penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah: Bantuan PKH mampu menjelaskan atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak – anak RTSM di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie mencapai 96,8 persen dan sisanya sebesar 3,2 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.⁴²

4. Yudid dkk, dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Mengemukakan bahwa: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik sampai sekarang ini. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan anak Rumah tangga sangat miskin.⁴³
5. Apando Ekardo, dkk, Dalam penelitian yang berjudul *“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan”* hasil dari penelitian ini adalah: sasaran PKH di nagari Lagan Hilir Punggasan masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan di lapangan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas yang mendapat bantuan.

⁴²Rusydi, *Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie*, (Journal Of Economic Management & Business - Vol. 17, No. 1, April 2016),

⁴³ Yudid, et.al. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, (Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik (JISIP) Vol. 3 N0.1,2014), h.36

Dana bantuan PKH bagi RTSM sudah meringankan beban pengeluaran, namun RTSM masih menganggap belum cukup, mereka mengungkapkan bahwa perlengkapan pendidikan anak-anaknya semua mahal dan tidak mencukupi dengan bantuan yang mereka terima. Berdasarkan beberapa hal di atas maka untuk tujuan penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa Program Keluarga Harapan di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program tersebut, tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan taraf pendidikan anakanak RTSM dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM.⁴⁴

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di penelitian sebelumnya membahas mengenai efektifitas serta pelaksanaan dari PKH, sementara penelitian ini akan memfokuskan pada peran dari PKH dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dimana penelitian ini akan mengerucut pada pemanfaatan dari PKH dalam bidang pendidikan.

⁴⁴ Apando Ekardo, et.al. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*, (Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume III Nomor 1, 2014). H.8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program menurut kamus umum bahasa indonesia adalah rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha (dalam ketata negaraan, dan perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.¹

Sedangkan definisi keluarga menurut Hanson dan Boyd dikutip Rika Damayanti, keluarga adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan dihubungkan oleh kasih sayang, tanggung jawab bersama dalam jangka waktu tertentu yang dikarakteristikan melalui komitmen, membuat keputusan bersama dan mencapai tujuan bersama.²

Harapan berasal dari kata harap yaitu keinginan supaya sesuatu terjadi atau suatu yang belum terwujud.³

Dari pengertian diatas yang di maksud dari Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 911

² Rika Damayanti, at.al, *Pengaruh Family Psychoeducation Islamic Therapy Terhadap Beban Dan Kemampuan Keluarga Dalam Merawat Klien Gangguan Jiwa*, (Bandar Lampung: Cv. Teams Barokah, 2013), h.11-12

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h.463

memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan⁴

Landasan Hukum Pemberian PKH

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembagunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurna Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- e. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar Pelaksanaan

- a. Keputusan Menti Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, no: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 september 2007.
- b. Keputusan Menti Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “ Tim Pelaksana Program Keluarga Harpan (PKH) tahun 2008” tanggal 08 januari 2008.
- c. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
- d. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
- e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).⁵

Tujuan umum yang tertuang dalam buku pedoman PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang

⁴ Pedoman umum program keluarga harapan (PKH), h.4-5

⁵ Direktorat Jendral, *Anggaran Kementrian Keuangan, Kajian Program Keluarga Harapan, 2015*, h. 5-6

mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM.
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.⁶

Berbagai strategi peningkatan akses sekolah kini telah tersedia, tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia, khususnya bagi anak-anak RTSM masih belum optimal. Dengan demikian, PKH pendidikan menjanjikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak RTSM dalam mengakses pelayanan pendidikan.⁷

Adapun manfaat program keluarga harapan, adalah :

- a. Dalam jangka pendek yaitu, memberikan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin
- b. Dalam jangka panjang, memutus rantai kemiskinan rumah tangga miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dan memberikan kepastian anak masa depannya
- c. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dll) dan anak bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah
- d. Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja dijalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial

⁶ pedoman umum program keluarga harapan (PKH), *Op.Cit*, h.6

⁷ *Ibid.*

2. Kreterian dan Kewajiban Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari basis data terpadu⁸ hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis rumah tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua, ayah, ibu dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur). PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program.

⁸ Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat penerima bantuan sosial, baik rumah tangga keluarga maupun individu penerima berdasarkan kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. Dikutip dari TNP2K, Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012), h.13

PKH diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita.
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- d. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
- e. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.⁹

Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban menurut KBBI merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang diwajibkan serta keharusan.¹⁰ Sehingga peserta PKH yang mendapatkan bantuan haruslah melaksanakan kewajibannya.

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting bagi suatu negara, karena kaitannya yang erat dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah

⁹ TNP2K, *Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta Pusat: TNP2K, 2012), h.27

¹⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1553

satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain penduduk, pemerintah sangat berkepentingan atas peningkatan kesehatan masyarakat secara umum.¹¹

Keluarga sangat miskin (KSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut.

Anak usia 0-6 tahun:

- 1) Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
- 2) Anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja).
- 3) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
- 5) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 6) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.¹²

¹¹ Hera Susanti, at.all, *Indikator-Indikator Makroekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), h.101

¹² Direktorat Jendral, *Op.Cit*, h.7-8

Ibu hamil dan ibu nifas:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.
- 4) Anak dengan disabilitas: Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesudah dengan jenis dan derajat kecacatan.

sebuah keluarga yang sehat akan menghasilkan individu dengan berbagai ketrampilan yang akan membimbing individu berfungsi dengan baik di lingkungan mereka, termasuk lingkungan kerja meskipun individu tersebut berasal dari berbagai kultur yang berbeda.¹³

b. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara dan memberikan latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Adapun arti dari pendidikan adalah proses

¹³ Rika Damayanti, *Op.Cit*, h.12

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan penulisan, proses, cara dan perbuatan mendidik.¹⁴

Menurut Dwi Siswoyo pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan mempengaruhi perkembangan fisik, daya jiwa (akal, rasa dan kehendak), sosial dan moralitas. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan.¹⁵

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperoleh kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena meningkatkan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang dengan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.

¹⁴ Amos Neolaka, Grace Amialia A Neolaka, *Landasan Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 15

¹⁵ Dwi Siswoyo, et.al, *Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press. 2011), h.65

Secara umum terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup.¹⁶

Dalam hal ini peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan atau terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD / MI / SDLB / Salafiyah Ula / Paket A atau SMP / MTs / SMLB / Salafiyah Wustha / Paket B termasuk SMP / MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

¹⁶ Veithzal Rivai Zainal, et.al. *The Economics of Education Mengolelolah Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 98-99

- 2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- 3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
- 4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.¹⁷

Bila kedua persyaratan di atas kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.¹⁸

¹⁷ Direktorat Jendral, *Op.Cit*, h. 8-9

¹⁸ TNP2K, *Op.Cit*, h. 29-31

3. Besaran Bantuan dan Mekanisme Pembayaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh direktorat jaminan sosial keluarga. Penyaluran bantuan diberikan 4 tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: nilai bantuan merujuk surat keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 desember 2016 tentang indeks dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000.
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000.
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000.¹⁹

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH.

Uang bantuan dapat diambil oleh pengurus keluarga di kantor pos terdekat

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (On-line) Tersedia di: www.kemsos.co.id. (Diakses: 3 Juni 2018).

dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Hak peserta PKH adalah:

- a. Menerima bantuan uang tunai.
- b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

B. Konsep Angka Partisipasi Sekolah (APS)

1. Definisi Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Partisipasi dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta di dalamnya.²¹

Menurut Cohn yang dikutip Abdul Karim, Partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.²²

Menurut Sumaryadi, partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dalam memberi masukan.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ Faiz Aminuddin, Ahmad Thoyib Syir'ah, *Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan*, (Jie Volume V No. 2 Oktober 2016), h.223

²² Abdul Karim, *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012), h. 104.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu proses kegiatan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis yaitu jenis kelamin, partisipasi yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan biasanya berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedudukan dan derajat selanjutnya akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan muda yang berbeda-beda dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.²⁴

Tingkat Pendidikan, Satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya memiliki pengetahuan yang luas dan bentuk serta

²³ Sumaryadi, I Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), h.46

²⁴ Faiz Aminuddin, *Op.Cit*, h.226-227

tata cara partisipasi yang dapat diberikan, faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap inovasi. Tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri, sedangkan penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.²⁵

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perhitungan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.²⁶ Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya.²⁷

Pendidikan harus selalu di tinjau, tinjauan dari aspek pendidikan menunjukkan perkembangan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, yakni rasio jumlah siswa terdidik pada usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah, baik usia sekolah pada tingkat dasar, menengah maupun tingkat perguruan tinggi.

Semakin besar rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan di sekolah mengalami peningkatan,

²⁵ *Ibid*, h.227

²⁶ BPS, *Op.Cit*.

²⁷ Hera Susanti, *Op.Cit*, h.115

sebaliknya semakin rendah rasio tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan di sekolah rendah. Sehingga indikator angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan perkembangan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan.²⁸ APS terdiri dari 2 jenis pengukuran yaitu:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.²⁹ APK sering disebut juga dengan *Gross Enrollment Rate (GER)*. APK juga sering digunakan untuk melihat kondisi pendidikan di Indonesia maupun juga di negara lain. Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang. Cara menghitung APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah

²⁸ Cristea Frisdiantara dan Imam Muklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*, (Malang, Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), h.76

²⁹ Kemdikbud, *Sistem Informasi APK APM*, (On-Line) Tersedia Di: [Http://Apkpm.Data.Kemdikbud.Go.Id/](http://Apkpm.Data.Kemdikbud.Go.Id/) (Diakses: 4 September 2018)

penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.³⁰

Rumus:

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah penduduk bersekolah di suatu jenjang tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia yang sesuai}} \times 100\%$$

Semakin tinggi angkanya, berarti semakin banyak penduduk usia sekolah SD/SLP/SLA yang bersekolah, sehingga semakin baik.³¹

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.³²

Rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{jumlah penduduk bersekolah sesuai usia tertentu}}{\text{Jumlah penduduk dengan usia yang sesuai}} \times 100\%$$

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Kegunaan APM Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.³³

Dalam penelitian ini digunakan pengukuran menggunakan angka partisipasi kasar (APK)

³⁰ Liesna Andriany, *Angka Partisipasi Kasar (APK) Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun* (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UISU), h.21

³¹ Hera Susanti, *Op.Cit*, h.115

³² Kemdikbud, *Op.Cit*.

³³ *Ibid*.

C. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Teori Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi status tertentu.³⁴

Merton dalam Erina mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.³⁵

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya.³⁶

peranan mencakup tiga hal, antara lain:

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h.1017

³⁵ Erina Pane, *Penguatan Peran Nazhir Di Bandar Lampung Dalam Mengelola Potensi Wakaf Produktif Dan Kontribusinya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Bandar Lampung, lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan, 2016), h.10-11

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.212

- a. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁷

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori peran. Teori peran yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.³⁸

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi maupun sebagai anggota masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam pergaulan sosial lazimnya sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Peran

³⁷ Erina Pane, *Op.Cit.*, h.11-12

³⁸ *ibid.*

merupakan bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Sasaran PKH adalah rumah tangga miskin (KSM). PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional yaitu bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur, serta untuk memberikan sistem jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. UU no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu bahwa negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Inpres no. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan yaitu rencana tindak percepatan pencapaian sasaran program

³⁹ *Ibid*, h.123

pro-rakyat, dan perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.⁴⁰

PKH menjadi model jaminan yang mana PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan, disisi lain PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah.⁴¹

Peran PKH adalah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan meningkatkan status pendidikan. Dalam menjamin ketersediaan pelayanan dibidang kesehatan indikatornya adalah:

- 
- a. Balita mendapatkan imunisasi
 - b. Ibu hamil memeriksakan kandungannya
 - c. Disabilitas dan lansia dapat memeriksakan kesehatannya

Sedangkan indikator dari meningkatnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran absensi sebanyak 85% dari hari sekolah
- b. Meningkatnya angka transisi anak sekolah kelas 6 dan 7
- c. Turunnya angka drop out

⁴⁰ Togjaratua Nainggolan, *Program Keluarga Harapan Di Indonesia*, (Jakarta Timur, P3KS Press, 2012), h.22

⁴¹ *Ibid.*

D. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *Oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan negara.⁴²

Adapun Islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan tuhan atau maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.⁴³ Kemudian pengertian ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:

⁴² Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2

⁴³ *Ibid*, h.5-6

- a. M. Akram Kan menjelaskan bahwa “*Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation*”. (Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi).⁴⁴ Definisi ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat), serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).
- b. M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*”. Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.⁴⁵
- c. Muhammad Abdul Manan memberikan pengertian ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami nilai-nilai islam, berdasarkan empat bagian

⁴⁴ *Ibid*, h. 7

⁴⁵ *Ibid*

yang nyata dari pengetahuan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang definisi ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam merupakan suatu perilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syariat dan tuntunan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga *maqhasyid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama lain. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Prinsip tauhid/ketuhanan

Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk. (Qs. Al-Ikhlash : 1-4)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

⁴⁶ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.325

⁴⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Op.Cit.* h.223

*Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."*⁴⁸

Dalam konteks berusaha dan bekerja, surat al-ikhlas ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah.

b. Prinsip keseimbangan

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang (Al-Qashash :77).



*Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponogoro, 2011) h. 486

⁴⁹ *Ibid*, h.315

c. Prinsip *khalifah*

Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupannya (Qs. Al-baqarah :30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵⁰

Allah SWT menceritakan prihal anugerahnya yang diberikan kepada bani adam, yaitu sebagai makhluk mulia, mereka disebutkan dikalangan makhluk yang mempunyai kedudukan tertinggi yaitu malaikat sebelum mereka diciptakan

d. Prinsip keadilan

Ekonomi Islam ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan saja tetapi juga menjaga manfaatnya (Al- Hujuraat : 9)

⁵⁰ Ibid, h.6

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ^ط فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ^ج
 فَإِنْ فَأَتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. ⁵¹

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari ekonomi-ekonomi lainnya, dan dikatakan ekonomi Islam jika sebuah ekonomi yang dijalani tersebut telah memenuhi/menjalankan prinsip ekonomi Islam diatas.

Sedangkan tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.⁵² Ekonomi Islam tidak hanya

⁵¹ Ibid, h.412

⁵² Ibid. h.53

berorientasi untuk pembangunan fisik-material dan individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ekonomi yang baik yaitu ekonomi yang menghantarkan masyarakat banyak kepada kemashlahatan dunia dan akhirat, dan hal tersebut dapat dicapai apabila ekonomi islam tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadist terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti suatu kaedah hukum, yaitu hukum Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi islam dengan lainnya, yaitu:⁵³

a. *'Adl*

Keadilan (*'adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, seluruh

⁵³*Ibid.* h.58

ulama tekemuka sepanjang sejarah Islam menetapkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*.

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan pelaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Seluruh makna adil tersebut akan terealisasi jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

b. Khalifah

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, berekonomi semata-mata untuk kemashlahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.⁵⁴

c. Takaful

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah bersaudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya

⁵⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.66.

melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*.

Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan sosial ini tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat non-materi. Adapun bentuk jaminan antara lain:

- 1) Jaminan terhadap pemilik dan pengelola sumber daya oleh individu.
- 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output.
- 3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.⁵⁵

4. Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Ekonomi Islam

Suatu bangsa wajib mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemilihan sumber daya insani yang kompeten akan menambah dividen kepercayaan antar pelaku bisnis, sehingga akan meningkatkan *profit* dan *benefit* dalam suatu perusahaan yang berimplikasi pada adanya kemajuan masyarakat. Sumber daya manusia yang unggul akan

⁵⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Op.Cit.* h.59-60.

membawa kemajuan bagi semua jenis kepemilikan, baik yang berupa usaha perseroan, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisnis lainnya dengan skala kecil yang meliputi kewirausahaan dan waralaba.⁵⁶

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) merupakan ironi bagi bangsa yang memiliki potensi SDM yang besar, yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang sangat besar. Bagaimanapun pesatnya pembentukan modal dan barang modal, seperti tersediannya komputer canggih, telekomunikasi modern dan lain sebagainya, namun tidak diiringi dengan pembangunan SDM yang terampil dan terlatih, maka semua itu akan menjadi hal yang sia-sia. Tersediannya barang modal yang canggih hanya akan efektif jika digunakan dan dirawat oleh tenaga-tenaga yang terampil dan terlatih, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan *output* yang dihasilkan.⁵⁷

Mengatasi masalah SDM merupakan tantangan yang paling membutuhkan waktu lama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan proses pertumbuhan SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, perlu untuk melihat secara riil sejauh mana pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai indikator indeks Pembangunan Manusia / *Human Development Index* (HDI).

Secara implisit HDI menegaskan adanya hubungan antara kondisi pendidikan dan kesehatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu

⁵⁶ Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit*, h.290

⁵⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h.150

negara, karena secara konseptual, HDI memadukan ketiga komponen utama yakni:

- a. Kualitas hidup yang diawali oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) per kapita per tahun.
- b. Kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup.
- c. Kondisi pendidikan, yang diwakili oleh tingkat melek huruf, namun kemudian diperluas dengan indikator lainnya.⁵⁸

Perbaikan kualitas pembangunan manusia akan sulit terwujud jika tidak diawali dari pendidikan karena proses pendidikan sangat menentukan kualitas manusia Indonesia yang diharapkan. Terutama untuk mampu membawa Indonesia bersaing secara global, sehingga membutuhkan satu usaha secara konsisten terutama pemerintah untuk mampu memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Di samping itu, pengembangan SDM juga dapat dilakukan dengan memfokuskan pada keterampilan yang langsung berguna bagi perkembangan dan kehidupan mereka di masyarakat.⁵⁹

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia memberikan manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperoleh kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan

⁵⁸ *Ibid*, h .150-151

⁵⁹ *Ibid*, h.160

manfaat hidup yang lebih lama karena meningkatkan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang dengan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.⁶⁰ Yang mengenyam pendidikan tinggi tentu mempunyai kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hanya tamat sekolah dasar. Setiap Negara di seluruh dunia begitu menekankan pentingnya kualitas pendidikan.⁶¹

ayat al-Qur'an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Allah SWT Berfirman (QS. Al-Mujadillah: 11)



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Atinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis” maka lapangkanla, niscaya allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya allah akan mengangkat (derajat) orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Didalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu, Allah SWT akan

⁶⁰ Veithzal Rivai Zainal, *Op.Cit*, h.98-99

⁶¹ Rubijanto Siswosoematto, et.al. *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.484

mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah SWT berikan kepada mereka.⁶²

Menurut H.A.R Tilaar, Sumber daya yang bermutu hanya dapat dicapai melalui system pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan kepribadian.⁶³

Menurut Mohammad Ali, Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penghasilan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan menyebabkan makin tingginya produktivitas, dengan tingginya produktivitas ini akan menyebabkan tingginya pendapatan. Pendekatan kapital manusia (*Human Capital*) merupakan bahwa pendapatan tenaga kerja disebabkan oleh perbedaan kualitas tenaga kerja.⁶⁴

Bila pendidikan dipandang sebagai suatu proses yang diupayakan dengan sengaja, baik secara formal, informal maupun non formal, maka proses tersebut secara logis berarti akan berakhir pada pencapaian tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai tersebut pada hakikatnya adalah merupakan upaya realisasi nilai-nilai yang dianut seseorang atau suatu

⁶² Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* 7, (Jakarta, Darul Haq, 2016), h.175

⁶³ H.A.R Tilaar, *Op.Cit*, h.302

⁶⁴ Mohammad Ali, *Op.Cit*, h. 190

kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi dan mewarnai pola kehidupan manusia, atau dengan lain perkataan bahwa segala tindak tanduk, segala usaha dan pekerjaannya dan sebagainya biasanya merupakan cermin dari nilai-nilai yang dianutnya dan cermin dari kehendak-kehendak yang ingin dicapainya.⁶⁵

Umar Muhammad Al-Thoumi Al-Syaibani mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membuka, mengembangkan dan mendidik segala aspek pribadi manusia dan segala potensinya, dan bertujuan untuk mengembangkan segala segi kehidupan dalam masyarakat, guna meningkatkan taraf kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta berusaha turut serta menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masa kini, dan bersiap menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan masa mendatang serta memelihara sejarah dan kebudayaan manusia.⁶⁶

5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Ekonomi Islam

Menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.

⁶⁵ Kholid Musyaddad Al-'Ulum, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. (Telaah Qur'ani ; Vol. 1, Tahun 2012), h.39

⁶⁶ *Ibid*, 39

Agar kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (*daruri*), skunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tashini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁶⁷

Konsep tanggung jawab melahirkan: *pertama*, perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*) sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. *Kedua*, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.⁶⁸

Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan peringkat prioritas mulai dari primer, sekunder, dan seterusnya demi kepentingan (*maslahah*) kaum muslim secara umum. Menurut Ibn Taimiyah dalam Minarni target-target alokasi pendistribusian keuangan publik seperti:

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h.89

⁶⁸ *Ibid*, h.65

- a. Biaya pertahanan dan keamanan
- b. Gaji pembesar, pegawai negara, dan pelaksana tugas yudisial dan keagamaan.
- c. Pembangunan sarana dan fasilitas umum seperti benteng, jalan, jembatan dan pelabuhan.
- d. Pembangunan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan.⁶⁹

Salah satu dari kewajiban negara ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Beginilah Islam mengadakan keseimbangan antara *individualisme* dan *kolektivisme*. Demikian maka dapat ditemukan salah satu korelasi langsung antara manifestasi iman dan takwa, dengan penciptaan kesejahteraan pada suatu negeri. (QS. Al-Baqorah: 126)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

“dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku

⁶⁹ Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam; Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 80.

paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali” (QS.Al-Baqarah:126)

Ayat di atas adalah doa Nabi Ibrahim AS untuk menjadikan negeri yang ditempati orang beriman (kepada Allah dan hari kemudian) sebagai negeri yang aman sentosa, yang dicukupkan limpahan rezki tidak hanya

bagi penduduk yang beriman, namun juga termasuk yang kafir (sebagai kesenangan sementara). Ayat ini mengisyaratkan seakan keamanan dan kesejahteraan ini bukan hanya milik umat Islam, namun dalam konteks bernegara merupakan hak setiap orang sebagai hak dasar (asasi). Oleh karenanya kewajiban yang harus dilakukan negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur bagi setiap warga penduduknya dapat tercapai, tanpa memandang suku golongan maupun agamanya sesuai dengan misi Islam rahmat bagi semesta alam. Seperti firman Allah SWT (QS. Al-Hujarat :13)⁷⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”.

Didalam surat ini menjelaskan tentang berbagai tanda dari dunia yang adil, mulia, bersih, dan sehat, maka di kemukakan tanda-tanda keimanan. Dengan identitas keimanan inilah kaum mukminin di seru

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, , terjemahan As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.407

untuk menegakkan dunia tersebut. Dengan identitas keimanan itulah mereka dibisiki agar mereka merespon seruan Allah yang mengajak mereka supaya melaksanakan berbagai tugas dengan sifat elok yang mendorong untuk merespon dan mematuhi.⁷¹



⁷¹ *Ibid*, h.408

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kecamatan Tanjung Karang Timur berdiri sejak tahun 1956 di mana kecamatan ini berdiri dari pemecahan Kecamatan Kota yang di masa itu merupakan bagian dari wilayah Kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Pada masa itu Kecamatan Kota terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Tanjung Karang, kemudian Kecamatan Tanjung Karang terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Tanjung Karang Barat. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Kecamatan Tanjung Karang Timur menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung. Ibu Kota Kecamatan terletak di kelurahan Kota Baru.¹

Tahun 2012, berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung no.04 tahun 2012, tentang penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur dibagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kota Baru
- b. Kelurahan Tanjung Agung
- c. Kelurahan Kebon Jeruk
- d. Kelurahan Sawah Lama
- e. Kelurahan Sawah Brebes

¹ Monografi Kec. Tanjung Karang Timur 2017

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Tanjung Karang Timur berada di Kelurahan Kota Baru.²

2. Letak Dan Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kecamatan Tanjung Karang Timur terletak di bagian timur wilayah hukum Pemda Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Tanjung Karang Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wayhalim
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian dan Enggal
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enggal

Pada umumnya Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagian besar adalah daratan dan 2,56% berbukit, serta beriklim sedang dengan suhu berkisar $\pm 21^{\circ}\text{C}$ - $\pm 34^{\circ}\text{C}$

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan profil Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah sebanyak 31.023 jiwa terdiri

² *Ibid.*

dari 15.241 laki-laki dan 15.782 perempuan dengan jumlah 8.168 KK.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia.

Tabel. 2
Usia Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	1.345	1.334	2.679
2	05-06	741	884	1.625
3	07-13	1.247	1.306	2.553
4	14-16	874	893	1.767
5	17-24	2867	2.411	5.278
6	25-52	6.664	7.207	14.871
7	55 Keatas	1.972	1.278	3.250
Jumlah		15.710	15.313	31.023

Sumber : dokumen Kec. Tanjung Karang Timur 2017

a. Agama

Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur mayoritas beragama Islam, hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai sarana untuk beribadah serta meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Adapun yang beragama selain Islam hanya sebagian kecil saja. Berdasarkan agamanya jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel. 3
Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Agama	Jumlah
1	Islam	30.020
2	Kristen	554
3	Khatolik	164
4	Hindu	40
5	Budha	241
6	Konghucu	4
Jumlah		31.023

Sumber : Monografi Kec. Tanjung Karang Timur 2017

b. Tingkat Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai. Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian pemerintah yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan, karena dengan meningkatnya pendidikan dapat mengubah taraf hidup seseorang. Berdasarkan tingkat pendidikannya jumlah Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel. 4
Tingkat Pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Tamat Perguruan Tinggi	2.269	7,3 %
2	Tamat SLTA	6.439	20,8 %
3	Tamat SLTP	4.683	15,1 %
4	Tamat SD	5.622	18,1 %
5	Belum Sekolah	1.914	6,2 %
6	Perguruan Tinggi	826	2,7 %
7	SLTA	1.201	3,9 %
8	SLTP	1.145	3,7 %
9	SD	2.477	7,9 %
10	TK	877	2,8 %
11	Tidak Sekolah	3.575	11,5 %
Jumlah		31.023	100 %

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

c. Mata Pencaharian/ Ekonomi Masyarakat

Dari data yang diinventarisasi selama tahun 2017 terdapat jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok timur sebagai berikut :

Tabel. 5
Mata Pencaharian Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI/ Polri	127
2	PNS	1.338
3	Bangunan	2.968
4	Angkutan	43
4	Buruh	3.134
5	Pensiunan	1.083
6	Karyawan Swasta	3.869
7	Dagang	4.053
8	Pertanian	46
9	Pertambangan	-
10	Pelajar	6.526
11	Tidak Bekerja (Balita)	2.016
12	Lain-lain	5.820
	Jumlah	31.023

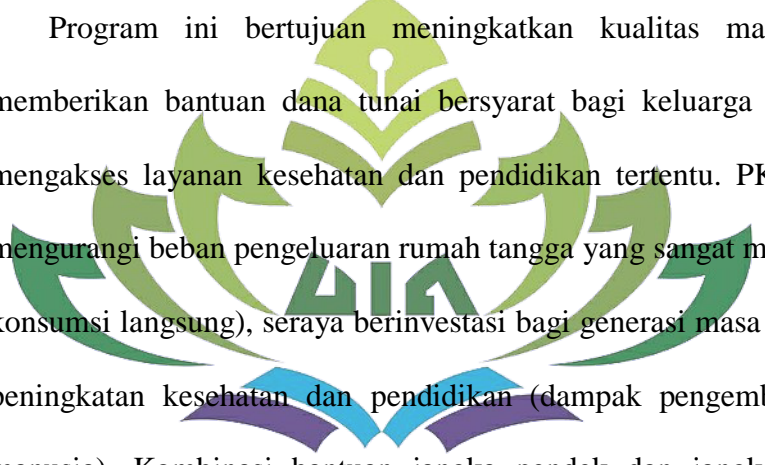
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

B. Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

1. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai wakil presiden RI dan terdiri atas sejumlah kementerian terkait (Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas) telah menerapkan PKH di tujuh provinsi pada 2007. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial membentuk unit pelaksana PKH (UPPKH) Pusat yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota..³



Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung), seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya.⁴

PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di awal kebijakan, pelaksanaan program rintisan ini menunjukkan kemajuan yang lamban, terlihat pada terbatasnya cakupan program (dalam pengertian jumlah keluarga maupun wilayah penerima manfaat). Sejak

³ Abdul Halim Mahally, *PKH Dan Masyarakat Miskin*, (On-line) Diakses: [di:https://pkh.kemensos.go.id](https://pkh.kemensos.go.id) (Diakses: 4 Juli 2018)

⁴ Suahasil Nazara, *Op.Cit.* h.1

tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan PKH, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.⁵

Dalam perjalanannya, PKH dikembangkan di 25 provinsi pada 2011 dan telah mencakup 33 provinsi pada awal 2012. Tujuan PKH di antaranya adalah memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang masuk domain KSM. Program perlindungan sosial (*social protection*) semacam ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi minimalisasi angka kemiskinan di suatu negara.⁶

Program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Lampung berlangsung sejak 2011, Bandar Lampung PKH baru ada pada tahun 2011, dan pada tahun tersebut PKH langsung didistribusikan ke seluruh kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung, termasuk Kecamatan Tanjung Karang Timur. PKH di berikan kepada keluarga miskin yang memenuhi komponen yang telah ditetapkan seperti anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas berat.⁷

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2012, penetapan sasaran PKH mulai menggunakan Basis Data Terpadu (BDT). Basis data ini, yang didasarkan pada data tahun 2011, berisi nama dan alamat individu rumah tangga yang berada pada 40 persen

⁵ *Ibid*, h.1

⁶ Abdul Halim Mahally, *Op.Cit.*

⁷ Wawancara Bapak Cucu, Ketua Pendamping Pkh Bandar Lampung, Pada (Kamis, 31 Mei 2018, Pukul 10.20)

sebaran kesejahteraan terendah. BDT, yang dikelola oleh Sekretariat TNP2K, merupakan cara memadukan sistem penetapan sasaran nasional.⁸

Setelah peserta PKH ditetapkan dari pusat maka diadakan pertemuan untuk dilakukan validasi data dan pengisian formulir, setelah validasi data dan pengisian formulis selanjutnya pengambilan dana tahap awal berdasarkan validasi melalui bank dan seterusnya akan diambil menggunakan rekening atau ATM, dana diambil langsung oleh keluarga penerima manfaat (KPM) secara langsung tanpa perantara.⁹

a. Pelaksana PKH

PKH merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia, dalam hal implementasi kebijakan yang paling berperan adalah pelaksanaan kebijakan itu sendiri serta proses dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tercapainya pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Karang Timur tidak terlepas dari peran aktif pendamping yang senantiasa melakukan tugas dalam pendampingan.

Agar tercapainya pelaksanaan PKH maka pendamping melakukan pertemuan dengan para ketua kelompok PKH dan Peserta PKH untuk selalu meninjau perkembangan bantuan yang telah diterima agar digunakan sebagai mestinya, serta melakukan pendekatan dan mendengarkan keluhan dari KPM, memvalidasi data peserta, dan

⁸ Suahasil Nazara, *Op.Cit.* h.1

⁹ Wawancara Mba Eli, Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur (Jum'at, 25 Mei 2018).

memotivasi peserta PKH untuk selalu komitmen untuk menjalankan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa para pendamping melaksanakan tugasnya sebagai pendamping dengan sangat baik dengan selalu memonitoring.

b. Penyaluran Bantuan

Dana bantuan PKH di salurkan ke KPM melalui rekening bank BRI, dimana setiap peserta wajib memiliki rekening, peserta yang terdaftar mendapat bantuan PKH akan di pandu untuk pembuatan rekening hingga pengambilan dana. Untuk dana yang diterima oleh KPM sebagai berikut:

Tabel. 6
Besaran Dana Bantuan

Komponen Bantuan	Jumlah
Bantuan Sosial PKH	1.890.000
Bantuan Lanjut Usia	2.000.000
Bantuan Penyandang Disabilitas	2.000.000

Sumber: UPPKH Kota Bandar Lampung

Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan empat tahap dalam satu tahun dengan jumlah Rp.1.890.000 pertahun untuk bantuan sosial sedangkan disabilitas dan lansia sebesar Rp.2.000.000, pembayaran dilakukan per-triwulan dengan jumlah uang Rp. 500.000 triwulan 1, Rp.500.000 triwulan 2, Rp.500.000 triwulan 3 dan Rp. 390.000 triwulan 4 untuk bantuan sosial sedangkan Rp, 500.000 untuk disabilitas dan lansia.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta, jumlah bantuan yang diterima awalnya tidak sama, selalu berubah akan tetapi untuk saat ini jumlah bantuan selalu sama. Hal ini juga di benarkan oleh

pendamping bahwa jumlah bantuan untuk tahun ini disama ratakan yaitu bantuan sosial Rp.1.890.000 dan komponen lainnya Rp.2.000.000.

Dalam pemanfaatannya dana yang digunakan oleh peserta PKH sudah baik, hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan peserta PKH mengenai pemanfaatan PKH, ibu salma menyatakan bahwa:

“ dengan adanya bantuan ini saya merasa terbantu, membeli peralatan dan perlengkapan sekolah juga tidak memberatkan saya lagi, jadi untuk memasuki ajaran baru saya tidak pusing memikirkan biaya untuk membeli buku anak”

Dari wawancara tersebut menunjukan bahwa sudah banyak warga yang memanfaatkan dana untuk kepentingan pendidikan.

Akan tetapi untuk pendistribusian dana PKH, ketepatan waktu pencairan dana tidak tetap sehingga para peserta tidak dapat memperkirakan dana yang kapan akan keluar, sehingga KPM berasumsi bahwa secepatnya dana akan keluar kembali. Hal ini diperkuat dari wawancara peserta PKH yang menyatakan bahwa:

“untuk pencairan dana sendiri tidak tetap kapan datangnya, saya juga masih menunggu dana PKH cair karena sudah mau masuk ajaran baru akan tetapi saya tidak mempunyai uang untuk membeli peralatan sekolah, bulan lalu dana PKH sudah cair dan saya pergunakan untuk keperluan lebaran dulu karena saya fikir bulan ini akan dapat lagi, akan tetapi masih belum keluar juga danannya”

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih ada peserta PKH yang tidak dapat memanfaatkan atau memprioritaskan dana untuk pendidikan ataupun kesehatan. Sedangkan tujuan dana PKH di salurkan melalui rekening bank agar peserta PKH dapat menabungkan uangnya untuk keperluan pendidikan atau kesehatan.

3. Peran Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH memiliki misi yaitu mendukung target penurunan angka kemiskinan 7-8 % (RPJMN), dan memiliki peran yaitu menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan meningkatkan status pendidikan¹⁰ Bantuan PKH ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh mba Keni selaku pendamping PKH menjelaskan bahwa *“bantuan PKH berupa uang secara tunai melalui rekening bank yang diperuntukan khususnya untuk pendidikan dan kesehatan”*¹²

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada rumah tangga sangat miskin. PKH kesehatan mewajibkan peserta PKH agar rutin memeriksakan kesehatannya serta PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar menghadiri kehadiran di sekolah serta mendaftarkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal ataupun nonformal, berdasarkan wawancara mba Eli

“PKH pendidikan mengharuskan anak penerima memenuhi kehadiran di sekolah sekurang-kurangnya 85% dari hari aktif sekolah, agar tidak terjadi putus sekolah pada anak serta bagi peserta yang memiliki anak

¹⁰ *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2016), h.3.

¹¹ Togiaratua Nainggolan, *Op.Cit*, h.25

¹² Wawancara Mba Keni, Pendamping PKH Kecamatan Tanjugn Karang Timur (Rabu, 18 Juli 2018, pukul 10.00)

usia sekolah yang tidak tamat SD di haruskan untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan”¹³

setiap tahunnya di Kecamatan Tanjung Karang Timur berhasil membuat anak putus sekolah kembali bersekolah dan dapat meyakinkan keluarga peserta PKH untuk mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan, hal ini diperkuat oleh Berdasarkan hasil wawancara dari mba Keni selaku pendamping.

“Bukan hanya bantuan saja yang diberikan oleh PKH tapi PKH juga memotivasi agar peserta PKH dapat mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan. Untuk anak yang putus sekolah kami berhasil membawa anak tersebut kembali bersekolah sebanyak-banyaknya sekitar 5-10 orang per tahunnya. Dan setiap pemutakhiran data kami menghimbau untuk keluarga PKH agar mereka tetap melanjutkan pendidikan anak hingga tingkat SMA”.

Hal yang membuat anak tidak dapat berpartisipasi sekolah sebagian besar adalah karena kurangnya motivasi belajar pada anak, serta faktor ekonomi dari keluarga, hal ini di perkuat dari wawancara beberapa responden yang memiliki anak tidak sekolah.

Dan dalam mencegah terjadinya putus sekolah pada anak atau *drop out*, PKH mewajibkan kehadiran 85% kehadiran anak di sekolah dari hari aktif sekolah, Dengan terpenuhinya komitmen kehadiran sebesar 85% maka akan terhindar dari *drop out*. Sehingga anak peserta tetap dapat berpartisipasi, apabila anak dari peserta PKH tidak dapat memenuhi komitmen kehadiran sekurang-kurangnya 85% maka akan diberikan teguran, hingga tiga kali berturut-turut dan jika peserta tidak memenuhi komitmennya maka akan

¹³ Wawancara Mba Eli, Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur (25 April 2018)

dikenai sanksi yaitu berupa pemotongan dana bantuan sebesar 10% dari dana yang diterima.

Demi kelancaran jalannya program ini, UPPKH mengontrol komitmen dari peserta PKH dengan menugaskan pendamping PKH di kecamatan. Dengan adanya pendamping maka jalannya PKH dapat di monitoring.

Tugas pendamping antara lain melakukan pendataan peserta PKH, mensosialisasikan mengenai PKH dan memotivasi peserta PKH untuk selalu memenuhi dan menjalankan komitmennya di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu peserta PKH yang tidak memenuhi komitmennya maka akan dikenai sanksi.

Sosialisasi juga berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai PKH serta tujuan PKH akan tetapi ada kendala pada pendamping untuk mensosialisasikan PKH dikarenakan Para peserta PKH merupakan keluarga yang berlatar belakang pendidikan yang rendah, dilihat dari hasil wawancara pada 34 peserta, sebanyak 26 peserta tidak tamat SD, sebanyak 5 peserta tamatan SD, 3 peserta tamatan SMP dan 0 peserta tamatan SMA.

Adapun hasil dari wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut: Usia para penerima manfaat dari 34 responden didapat bahwa usia sekitaran 20-30 tahun sebanyak 2 orang, 31-40 tahun sebanyak 23 orang, 41-50 tahun sebanyak 4 orang dan 50 ke atas sebanyak 5 orang.

Dalam pengetahuan mengenai PKH serta tujuan PKH, terdapat sebanyak 19 responden menyatakan bahwa program ini adalah program bantuan dari pemerintah untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk anak sekolah,

sedangkan 15 responden lainnya menyatakan bahwa program ini adalah program bantuan dari pemerintah untuk membantu perekonomian keluarga sehari-hari.

Pengajuan atau syarat untuk mendapat bantuan PKH ini sebanyak 34 responden dari 34 responden menyatakan bahwa penentuan peserta di pilih langsung dari pusat, tidak ada pengajuan PKH dari masyarakat, masyarakat yang menerima PKH mendapat pemberitahuan bahwa mereka menjadi peserta PKH atau mendapatkan bantuan dari program ini. Sedangkan persyaratan untuk tetap mendapat bantuan PKH, peserta harus memenuhi salah satu atau lebih komponen yang di tetapkan PKH yaitu mempunyai anak usia sekolah 7-18 tahun (SD-SMA), ibu hamil, balita, disabilitas, dan lansia.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program keluarga harapan (PKH), 34 responden menyatakan hal tersebut. Sebagian responden menyatakan bahwa dengan mendapat bantuan PKH, beban untuk sarana pendidikan seperti membeli peralatan sekolah menjadi lebih ringan. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu untuk tambahan kebutuhan sehari-hari walau membantu akan tetapi masih kurang untuk kebutuhan hidup.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kecamatan Tanjung Karang Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7
Penduduk Usia 7 – 12 Tahun

No	Kelurahan	Anak Usia 7-12 Tahun
1	Kota Baru	653 orang
2	Tanjung Agung	590 orang
3	Kebon Jeruk	430 orang
4	Sawah Lama	377 orang
5	Sawah Brebes	451 orang
	Jumlah	2.501 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Dari data di atas diketahui jumlah keseluruhan anak yang seharusnya mengikuti pendidikan di SD/MI sederajat di Kecamatan Tanjung Karang Timur sebanyak 2.501 orang. Jumlah penduduk usia sekolah SD yang terbanyak di kelurahan Kota Baru sebanyak 653 orang, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah SD yang paling sedikit di antara Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah Kelurahan Sawah Lama sebanyak 377 orang.

Selanjutnya dapat dilihat penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan baik di SD maupun di MI / sederajat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Peserta didik SD / MI Sederajat

No	Kelurahan	Peserta Didik SD / MI
1	Kota Baru	660 orang
2	Tanjung Agung	606 orang
3	Kebon Jeruk	421 orang
4	Sawah Lama	355 orang
5	Sawah Brebes	430 orang
	Jumlah	2.472 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Peserta didik SD/MI di Kecamatan Tanjung Karang Timur berjumlah 2.472 orang. Seimbang dengan banyaknya jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Kelurahan yang memiliki peserta didik SD / MI terbanyak yaitu kelurahan kota baru sebesar 660 orang, dan kelurahan Sawah Lama merupakan kelurahan yang jumlah peserta didik SD/MI nya paling sedikit yaitu sebanyak 355 orang.

Tabel. 9
Penduduk Usia 13-15 Tahun

No	Kelurahan	Anak Usia 13-15 Tahun
1	Kota Baru	422 orang
2	Tanjung Agung	187 orang
3	Kebon Jeruk	267 orang
4	Sawah Lama	239 orang
5	Sawah Brebes	242 orang
	Jumlah	1.357 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Dari data di atas diketahui jumlah keseluruhan anak yang seharusnya mengikuti pendidikan di SMP/MTS di Kecamatan Tanjung Karang Timur sebanyak 1357 orang. Jumlah penduduk usia SMP yang terbanyak di kelurahan Kota Baru sebanyak 422 orang, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah SMP yang paling sedikit di antara Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah Kelurahan Tanjung Agung sebanyak 187 orang.

Selanjutnya dapat dilihat penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan baik di SMP / MTS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 10**Peserta Didik SMP / MTS Sederajat**

No	Kelurahan	Peserta Didik SMP / MTS
1	Kota Baru	391 orang
2	Tanjung Agung	154 orang
3	Kebon Jeruk	205 orang
4	Sawah Lama	218 orang
5	Sawah Brebes	177 orang
	Jumlah	1.145 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Peserta didik SMP / MTS di Kecamatan Tanjung Karang Timur berjumlah 1.145 orang. Seimbang dengan banyaknya jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Kelurahan yang memiliki Peserta didik SMP / MTS terbanyak yaitu kelurahan kota baru sebesar 391 orang, dan kelurahan tanjung agung merupakan kelurahan yang jumlah siswa SMP / MTS nya paling sedikit yaitu sebanyak 154 orang.

Tabel. 11
Penduduk Usia 16-18 Tahun

No	Kelurahan	Anak Usia 16-18 Tahun
1	Kota Baru	336 orang
2	Tanjung Agung	147 orang
3	Kebon Jeruk	255 orang
4	Sawah Lama	265 orang
5	Sawah Brebes	293 orang
	Jumlah	1.296 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Dari data di atas diketahui jumlah keseluruhan anak yang seharusnya mengikuti pendidikan di SMA/MA di Kecamatan Tanjung Karang Timur sebanyak 1.296 orang. Jumlah penduduk usia SMA yang terbanyak di kelurahan Kota Baru sebanyak 336 orang, sedangkan jumlah penduduk usia

sekolah SMA yang paling sedikit di antara Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah Kelurahan Tanjung Agung sebanyak 147 orang.

Selanjutnya dapat dilihat penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan baik di SMA/MA Sederajat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 12
Peserta Didik SMA/MA Sederajat

No	Kelurahan	Peserta Didik SMP / MTS
1	Kota Baru	287 orang
2	Tanjung Agung	140 orang
3	Kebon Jeruk	252 orang
4	Sawah Lama	241 orang
5	Sawah Brebes	281 orang
	Jumlah	1.201 orang

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Tanjung Karang Timur Pada (21 Maret 2018)

Peserta didik SMA/MA di Kecamatan Tanjung Karang Timur berjumlah 1.201 orang. Seimbang dengan banyaknya jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Kelurahan yang memiliki Peserta didik SMA/MA terbanyak yaitu kelurahan kota baru sebesar 287 orang, dan kelurahan tanjung agung merupakan kelurahan yang jumlah Peserta didik SMA/MA nya paling sedikit yaitu sebanyak 140 orang.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat global, termasuk di Indonesia dan menjadi persoalan utama yang harus dihadapi karena kemiskinan adalah penghambat dalam proses pembangunan negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah mendesak yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan pada masyarakat miskin. Bidang pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan terwujudnya kesehatan dan pendidikan yang baik pada masyarakat dapat menunjang keberhasilan dan meningkatkan produktifitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penganggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem

¹ Hendri, Isnaini, “ *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Bidang Pendidikan* ” (Jurnal Administrasi Publik, 2014), h.215

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.²

Program ini lebih dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang kategorinya sudah ditentukan oleh Basis data terpadu dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.³

PKH memfokuskan dibidang kesehatan dan dibidang pendidikan dimana setiap keluarga yang menjadi sasaran program ini berhak mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan, mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu, polindes dan sebagainya, mendapat pelayanan pendidikan bagi yang belum atau tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.

PKH menjadi model jaminan yang mana PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan, disisi lain PKH bernuansa pemberdayaan yakni menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari

² Direktorat Jendral, *Op.Cit*, H. 2

³ Rusyadi, *Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie* (Journal Of Economic Management & Business, 2016), h. 78

kemiskinannya melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah.⁴ Pkh sebagai program yang mencoba merubah pemahaman masyarakat miskin untuk merubah kehidupan keturunannya dengan berpartisipasi aktif dibidang pendidikan dan kesehatan.

Untuk memaksimalkan program ini, KEMENSOS telah menunjuk pendamping sebagai pengawal program, di setiap kota di bentuk Unit pelaksanaan program keluarga harapan (UPPKH) yang dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang kemudian dilanjutkan oleh pendamping Kecamatan. Pendamping Program Keluarga Harapan adalah petugas yang ditugaskan langsung terjun kelapangan mengontrol jalannya Bantuan PKH, adapun tugas pendamping yaitu melakukan pendataan peserta PKH, mensosialisasikan mengenai PKH, pemutakhiran data dan memotivasi peserta PKH untuk selalu memenuhi dan menjalankan komitmennya di bidang pendidikan dan kesehatan

PKH mulai dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tahun 2011, dan langsung dilaksanakan di berbagai Kota, termasuk kota Bandar lampung yang memiliki beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Kadamaian, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Enggal, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Panjang, Kecamatan Way Halim, Kecamtan Raja Basa, Kecamatan Tanjung Senang, Kecmatan Kedaton Kecamatan Teluk Betung

⁴ *Ibid.*

Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Labuhan Ratu, Dan Kecamatan Teluk Betung Timur. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Di Kecamatan Tanjung Karang Timur telah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai tahun 2011, Berdasarkan hasil pengamatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan 34 orang responden keluarga penerima manfaat (KPM) Kecamatan Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, rata-rata mereka menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat membantu keuangan mereka, Dimana uang yang di dapat dari bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan serta dapat membantu ekonomi yang tidak tercukupi.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Karang Timur mendapatkan respon positif dan negatif dimana respon positif dari keluarga penerima manfaat adalah mereka merasa terbantu dengan adanya PKH, sedangkan respon negatifnya diberikan oleh warga khususnya yang tidak mendapat PKH, mereka mengeluhkan bahwa program ini tidak adil, karena banyak masyarakat yang tidak mampu akan tetapi tidak mendapat bantuan.

Dalam menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan PKH mengupayakan berbagai cara agar para peserta PKH mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana belajar. Belajar untuk menjadi insan yang berkualitas, dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan dalam pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki, dan tujuan

Pendidikan yaitu untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sedangkan Partisipasi Pendidikan Anak dimulai dari anak usia dini (0-6 tahun) telah ada walaupun masih belum memadai. Rendahnya kualitas anak usia dini ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya mutu pendidikan dan pengetahuan keluarga dalam menstimulasi perkembangan anak.

Dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, ada beberapa indikatornya antara lain:

1. Kehadiran Absensi 85% Dari Hari Sekolah

Kehadiran siswa di sekolah (*school attendance*) adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Dengan hadir dalam aktivitas sekolah maka secara langsung peserta didik berpartisipasi dalam pendidikan.

Demi terpenuhinya kehadiran sebanyak 85% dari hari aktif sekolah, PKH menerjunkan pendamping untuk memonitoring anak dari peserta PKH agar selalu memenuhi komitmennya. Para pendamping mengontrol kehadiran peserta didik dengan mengecek ke sekolah sekolah, pengecekan dilakukan selama sebulan sekali.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pendamping bahwa keikutsertaan peserta didik atau kehadiran

yang ditargetkan sebanyak 85% sudah sangat baik dimana setiap bulan pengecekan peserta didik anak dari peserta PKH sebagian besar terpenuhi sebanyak 85% di tingkat SD dan SMA, sedangkan untuk tingkat SMP masih cukup banyak peserta didik yang belum memenuhi komitmen kehadiran sebanyak 85%.

2. Meningkatnya Angka Transisi Anak Sekolah

PKH mensyaratkan agar anak dari peserta PKH di daftarkan ke satuan lembaga pendidikan, dan kembali mendaftarkan anaknya yang putus sekolah. Selain itu PKH juga menargetkan agar anak PKH dapat menyelesaikan sekolah hingga Sekolah Menengah Atas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas anak sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dimasa depan serta dapat keluar dari zona kemiskinan.

PKH memotivasi peserta akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, dengan motivasi yang diberikan dirahapkan agar peserta PKH dapat meningkatkan jenjang pendidikan bagi anaknya.

Angka transisi anak di Kecamatan Tanjung Karang Timur masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, meskipun bantuan PKH yang diberikan sebagian dapat dimanfaatkan dengan cara membelanjakan kebutuhan pendidikan, melanjutkan jenjang pendidikan anak serta dengan bantuan dari PKH beberapa anak yang tidak tamat SD melakukan kejar paket A dan dapat melanjutkan ke tingkat SMP, Akan tetapi ada beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah, hal dikarenakan

oleh pergaulan serta kondisi ekonomi, dan mayoritas anak putus sekolah terjadi pada saat masa transisi sekolah. hal ini diperkuat dari wawancara beberapa responden dan pendamping PKH.

Dengan banyaknya anak yang putus sekolah atau melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi maka hal ini akan berpengaruh terhadap partisipasi dalam pendidikan sehingga anak usia sekolah dapat terserap secara keseluruhan dan akan berdampak pada kenaikan angka partisipasi sekolah.

3. Turunnya Angka *Drop Out*

Untuk meminimalisir *drop out* pada anak maka dilakukan motivasi belajar serta kewajiban kehadiran 85% harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya kehadiran ini maka kecil kemungkinan *drop out* akan terjadi, sehingga akan meminimalisir adanya anak yang bekerja di bawah umur .

Menurut hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan, tingkat *drop out* pada peserta didik semakin menurun, hal ini dilihat dari data-data yang dimiliki pendamping bahwa anak peserta PKH semakin berkurang tingkat *drop out*, ini dikarenakan selalu dikontrolnya komitmen dari peserta PKH.

Dari beberapa indikator diatas dilihat dari komitmen KPM Dengan dilakukan data secara rutin serta kepatuhan KPM dalam proses jalannya PKH ini, dengan tercapainya kehadiran 85% ini menunjukkan bahwa kehadiran , menurunnya angka *drop out*, angka transisi anak sekolah pada tingkat SMP masih ada beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah, mayoritas dari

mereka tidak bersekolah bukan karena himpitan biaya, melainkan karena kurangnya motivasi belajar. Hal ini di pertegas dari hasil wawancara

“masalah anak tidak mau bersekolah sebenarnya bukan karena biaya, tetapi karena dari kemauan anak tersebut, memang anaknya yang tidak mau bersekolah dan memilih untuk main”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa yang membuat anak kurang berpartisipasi dalam sekolah adalah kurangnya motivasi yang diberikan untuk anak serta kurangnya pemanfaatan waktu luang anak, hal ini sejalan dengan pendapat abdullah Nashi dalam bukunya pendidikan anak dalam islam yang mengemukakan bahwa Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyimpangan dalam diri anak adalah tidak dipergunakannya dengan baik waktu kosong yang ada pada keseharian anak-anak dan para remaja serta Pergaulan negatif serta teman-teman yang tidak baik.

Dengan tercapainya indikator tersebut maka akan membuat para peserta didik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pendidikan, hal ini akan berdampak pada angka partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Untuk melihat angka partisipasi sekolah maka diperlukan angka partisipasi kasar (APK), APK digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program serta sejauh mana lembaga pendidikan sudah menyerap anak usia sekolah.

APK dapat dihitung dengan membagikan Jumlah siswa bersekolah pada jenjang tertentu dengan penduduk pada usia yang sesuai. Adapun APK di Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Tabel. 13
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI Sederajat

No	Kelurahan	Anak Usia 7-12 Tahun	Jumlah Siswa SD / MI	APK SD / MI (%)
1	Kota Baru	653	660	101,07
2	Tanjung Agung	590	606	102,71
3	Kebon Jeruk	430	421	97,91
4	Sawah Lama	377	355	94,16
5	Sawah Brebes	451	430	95,34
	Jumlah	2.501	2.472	98,24

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Timur Maret 2018

Dilihat dari APK kecenderungan menunjukkan pola yang hampir sama, setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur rata-rata di atas 90 %. Dari data di atas Kelurahan Tanjung Agung merupakan kelurahan yang angka partisipasi kasarnya (APK) tertinggi mencapai 102,71%, ini adalah angka yang menunjukkan bahwa banyaknya anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD, dengan persentase yang lebih dari 100% ini menunjukkan bahwa ada anak yang bersekolah di tingkat SD yang berusia lebih dari 12 tahun atau kurang dari 7 tahun, dengan demikian maka terdapat 2,71 % anak yang bersekolah di tingkat SD di luar dari umur 7-12 tahun. sedangkan kelurahan yang memiliki angka partisipasi terkecil adalah Kelurahan Sawah Lama sebesar 94,16% yang menandakan bahwa masih ada 5,84% anak yang berusia 7-12 tahun yang tidak mengenyam pendidikan

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SD untuk Kecamatan Tanjung Karang Timur mencapai 98% yang

artinya hampir seluruh anak usia 7-12 sedang mengenyam pendidikan di tingkat SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak SD sudah sangat baik.

Tabel. 14

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTS Sederajat

No	Kelurahan	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumla Siswa SMP/MTS	APK SMP/MTS (%)
1	Kota Baru	422	391	92,65
2	Tanjung Agung	187	154	82,35
3	Kebon Jeruk	267	205	76,78
4	Sawah Lama	239	218	91,21
5	Sawah Brebes	242	177	73,14
	Jumlah	1.357	1.145	83,23

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Timur Maret 2018

Dilihat dari indikator APK kecenderungan menunjukkan pola yang bervariasi antar kelurahan, dari data di atas dapat dilihat bahwa kelurahan Kota Baru merupakan kelurahan yang angka partisipasi kasarnya tertinggi mencapai 92,65%, ini adalah angka yang menunjukkan bahwa banyaknya anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTS dan masih ada 7,35% penduduk yang tidak bersekolah di tingkat SMP Sederajat, sedangkan kelurahan yang memiliki angka partisipasi terkecil adalah Kelurahan Sawah Brebes sebesar 73,14% yang menandakan bahwa masih ada 26,86% anak yang berusia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTS untuk Kecamatan Tanjung Karang Timur mencapai 83,23% yang artinya masih banyak anak usia SMP yang tidak mengenyam pendidikan hingga mencapai 16,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

partisipasi sekolah cukup baik dengan persentase yang menunjukkan angka partisipasi SMP sebesar 83,23%.

Tabel. 15

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat

No	Kelurahan	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Jumla Siswa SMA/MA	APK SMA/MA (%)
1	Kota Baru	336	287	85,42
2	Tanjung Agung	147	140	95,24
3	Kebon Jeruk	255	252	98,82
4	Sawah Lama	265	241	90,94
5	Sawah Brebes	293	281	95,90
	Jumlah	1.296	1.201	93,26

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Timur Maret 2018

Dilihat dari indikator APK kecenderungan menunjukkan pola yang bervariasi antar kelurahan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kelurahan Kebon Jeruk merupakan Kelurahan yang angka partisipasi kasarnya tertinggi mencapai 98,82%, ini adalah angka yang menunjukkan bahwa banyaknya anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA dan masih ada 1,18% penduduk yang tidak bersekolah di tingkat SMA Sederajat, sedangkan kelurahan yang memiliki angka partisipasi terkecil adalah kelurahan Kota Baru sebesar 85,42% yang menandakan bahwa masih ada 14,58% anak yang berusia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTS untuk Kecamatan Tanjung Karang Timur mencapai 83,23% yang artinya masih banyak anak usia SMP yang tidak mengenyam pendidikan hingga mencapai 16,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

partisipasi sekolah cukup baik dengan persentase yang menunjukkan angka partisipasi SMP sebesar 83,23%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya APK di kecamatan Tanjung Karang Timur mengalami peningkatan, adapun data APK Kecamatan Tanjung Karang Timur tahun 2016

Tabel. 16
APK SD, SMP dan SMA Sederajat di Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2016

Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Yang Sesuai	Angka Partisipasi Kasar (APK), (%)
SD	2.174	2.258	96,28
SMP	1068	1.287	82,98
SMA	942	1.025	91,90

Sumber : dok. Kecamatan tanjung karang timur 2017

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa ada kenaikan APK pada jenjang pendidikan, APK SD mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sedangkan APK SMP dan SMA hanya mengalami sedikit kenaikan. APK SD mengalami kenaikan sebesar 1,96% sedangkan APK SMP mengalami kenaikan 0.25% serta APK SMA mengalami kenaikan sebesar 0,44%. Dalam menaikkan APK, PKH melakukan berbagai cara agar anak di Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan melalui bantuan yang diberikan. Dari data APK di atas menandakan kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan, dan hanya mampu meningkatkan beberapa persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk angka partisipasi kasar sebelum dan sesudah adanya PKH dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel. 17
Data anak tidak bersekolah penerima PKH
di Kecamatan Tanjung Karang Timur

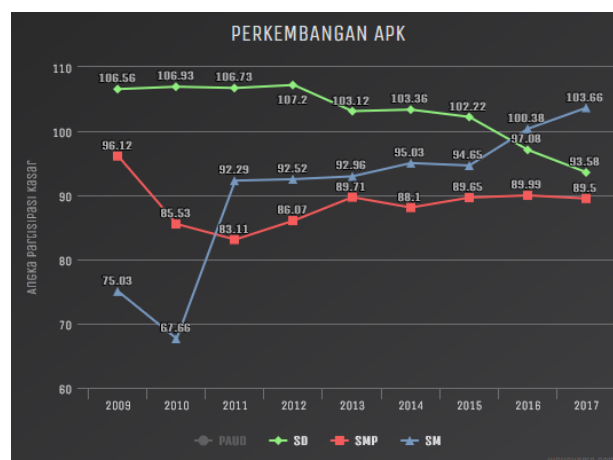
Kelurahan	2015		2016		2017		2018	
	Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesu- dah	Sebe- lum	Sesu- dah
Kota Baru	22	25	25	27	27	25	25	23
Kebon Jeruk	8	8	8	9	9	8	8	7
Tanjung Agung	6	4	4	4	4	5	5	4
Sawah Lama	15	19	19	19	19	17	17	17
Sawah Berebes	13	13	13	13	13	12	12	12

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Karang Timur 2018

Data di atas menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah anak yang tidak bersekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur, dapat dilihat dari data tersebut bahwa PKH di kecamatan tanjung karang timur hanya mampu mengurangi anak yang tidak bersekolah hanya 4-5 anak saja dan masih ada anak yang *Droup Out* atau tidak bersekolah selama jalannya PKH.

Sedangkan dilihat dari grafik APK di bandar lampung sebagai berikut:

APK Bandar Lampung



Sumber : Kemdikbud tahun 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan angka partisipasi kasar mengalami naik turun baik di jenjang SD, SMP, dan SMA selama tahun 2009 hingga 2017.

Data grafik menunjukkan tingkat partisipasi SMP merupakan yang terendah di tahun 2017 sedangkan jenjang SMA memiliki angka partisipasi yang paling tinggi di tahun 2017.

Tabel. 18
Target yang ingin dicapai di Provinsi Lampung

APK	Awal Periode	2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Partisipasi Kasar SD	110,7	111,9	110,17	111,94	111,44	111,99	106,28
Angka Partisipasi Kasar SMP	85,19	96,05	98,52	96,45	93,68	96,84	99,96
Angka Partisipasi Kasar SMA	63,48	70	66,06	72	82,98	74	77,81

Sumber : Kemdikbud 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk APK SD tidak tercapai selama tahun 2015 hingga tahun 2017, sedangkan Target APS SMP pada tahun 2015 sudah mencapai target yang ditentukan dan pada tahun 2016 target APK belum tercapai dan hanya terealisasi sebesar 93,58 dan pada tahun 2017 sudah mencapai target. Untuk APK SMA pada tahun 2015 yang terealisasi tidak mencapai target sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 sudah mencapai target.

Dalam program keluarga harapan di Kecamatan Tanjung Karang Timur pada tahun 2017 data APK SD sebesar 98,24, APK SMP sebesar 83,23 serta APK SMA sebesar 93,26. Dilihat dari target yang ditetapkan provinsi Lampung atas angka partisipasi kasar hanya jenjang SMA yang telah

mencapai target di Kecamatan Tanjung Karang Timur, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP masih belum memenuhi target yang ditentukan maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran PKH guna meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kecamatan Tanjung Karang Timur belum optimal. Dan indikator yang menjadi capaian tersebut antara lain yaitu dari angka drop out, angka transisi sekolah, dll.

B. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial.

Dalam pemenuhan dasar individu, negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung karena negara tidak langsung memberikan sandang, pangan, papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif dan negara memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum nafkah (*ahkam an-nafaqat*) atas individu-individu rakyat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Namun jika hukum ini sudah ditetapkan dan individu tetap tidak mampu, maka barulah negara berperan langsung menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) negara sejak awal memang berperan secara langsung, artinya negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis. Dan salah satu bantuan langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin sering disebut dengan jaminan sosial, salah satu jaminan sosial pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para peserta penerima bantuan secara tunai namun dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan pedoman umum PKH.

Peran PKH dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam:

1. Tanggung Jawab

Memimpin adalah amanah dan tanggung jawab yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang didalamnya mempunyai nilai konstruksosial yang tinggi, disamping itu amanah merupakan sesuatu yang sangat esensial dan menjadi salah satu pilar dalam hidup bernegara disamping keadilan. Amanah dipercaya kepada seorang pemimpin dan mengharuskan kepada penerima amanah bersiap adil dan memberikan kepada rakyat.

Sebuah negara yang pemerintahannya bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar kehidupan minimal bagi masyarakat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Pertama, penyedia jaminan sosial bagi semua orang terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, usia lanjut dan cacat. *Kedua*, keadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata diantara semua warga dengan meminimalkan celah antara si kaya dan si miskin dengan menggunakan pajak dan pengeluaran pemerintah yang efektif. *Ketiga*, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau sangat bersubsidi oleh negara. *Keempat*, mempertahankan tingkat *full employment* bagi angkatan kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. *Kelima*, menyediakan fasilitas umum untuk kalangan berpendapatan rendah dengan harga yang bersubsidi.

Konsep tanggung jawab melahirkan: *pertama*, perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (*maslahah*) sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. *Kedua*, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.⁵

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h.65

Dengan adanya berbagai program perlindungan sosial seperti PKH yang difokuskan di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya sudah tinggi dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memberikan bantuan untuk kemaslahatan masyarakatnya, sedangkan dilihat dari tanggung jawab masyarakat di Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam melakukan kewajibannya, masyarakat masih kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya seperti tidak memasukan anak ke lembaga pendidikan dan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi peserta penerima Program Keluarga Harapan.

Dilihat dari tidak patuhnya masyarakat akan tanggung jawabnya maka masyarakat harus di kembalikan pada cita-cita masyarakat ideal Islam yang dikenal dengan konsep *Ummah*. Konsep *Ummah* mengakomodir seraya mengatasi keterbatasan semua konsep sejenis yang dalam berbagai bahasa dan budaya menunjuk pada penggolongan manusia : komunitas, masyarakat, rakyat, bangsa, individu, suku, dan sebagainya. Konsep *Ummah* terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Ummat Wahidah

Kata *ummah* berarti kelompok manusia atau masyarakat.

Sedangkan kata *wahidah* adalah bentuk *muannas* dari kata *wahid*

berarti satu. Hal ini berarti dikatakan bahwa manusia dari dahulu hingga kini merupakan satu umat.⁶

Allah Swt menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka bisa hidup jika saling bantu membantu sebagai satu umat.

b. Ummat Wasatha

Secara harfiah, *Wasatha* berarti pertengahan atau *moderat*. Makna ini menunjuk pada pengertian *adil*. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spritual dalam segala aktivitas kehidupannya.⁷

Ditegaskan bahwa sebagai anggota masyarakat seseorang muslim harus dapat bersifat benar terhadap harta yang di anugerahkan Allah. Tidak bersikap boros dan tidak bersikap menahan harta, sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau anggota masyarakat yang membutuhkannya.

c. Khairu Ummah

Istilah *khairu ummah* yang berarti *ummat terbaik* atau *umat unggul*, yaitu (1) menyuruh kepada kebaikan, (2) mencegah dari yang buruk, dan (3) beriman kepada Allah.⁸

Dengan menerapkan konsep masyarakat ideal islam ini maka masyarakat akan lebih dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai

⁶ Sulaiman Kurdi, Masyarakat ideal Dalam Al-Qur'an, (Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 14. No. 1 Juni 2017), h. 45

⁷ *Ibid*, h.46

⁸ *Ibid*.

rakyat yang damai, amanah dan dapat menggunakan hartanya dengan semestinya.

Sementara itu untuk mengatasi masalah pergaulan anak yang mengakibatkan pada turunya partisipasi pendidikan anak tersebut maka dikembalikan pada ajaran islam, dimana Islam dengan ajaran-ajaran yang bersifat mendidik, telah mengarahkan kepada para orangtua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anaknya dengan perhatian yang sempurna.

Oleh karena itu bagi para pendidik seharusnya mengarahkan kecenderungan anak-anak dan para remaja tersebut, dengan mengisi waktu kosong mereka dengan berbagai aktifitas yang bermanfaat, yaitu membiasakan anak-anak untuk melakukan berbagai macam ibadah, terutama sholat yang merupakan tiang, pilar dan rukun dasar dalam agama islam. Selain itu mengarahkan anak-anak untuk mengisi waktu luangnya dengan banyak membaca, berjalan-jalan dan melakukan olahraga.

Jika para pendidik melaksanakan perunjuk-petunjuk islam ini, maka mereka akan dapat memberikan kesehatan, ilmu dan kekuatan kepada anak-anak. Sebagai dampaknya, anak-anak tidak akan terjerumus kepada kanakalan, sebaliknya mereka akan mengisi waktu-waktu kosong mereka dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi agama, dunia dan akhirat mereka.

2. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan,

kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun lanjut.

Sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat fisik saja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Dalam hal ini ada lima kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyat al-khams* (lima kebutuhan primer) kelima kebutuhan primer tersebut adalah agama/spiritualitas (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal atau intelektualitas (*al-aql*).

Ada dua bentuk sistem jaminan sosial yang berkenaan dengan pemenuhan kelima kebutuhan primer diatas. Pertama, dengan cara menyediakan segala sarana yang mampu menjaga serta memelihara keberadaan, serta keberlangsungan kelima hal tersebut bagi masyarakat (*Minahiyyah al-wujud*). Sebagai contoh pemenuhan kebutuhan primer yang berupa spiritualitas adalah dengan menyediakan sarana atau tempat ibadah bagi masyarakat. Sedangkan pemenuhan kebutuhan primer yang berupa intelektualitas adalah dengan menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas dan murah bagi masyarakat. Kedua, mencegah segala sesuatu yang mamapu meyebabkan hilang atau tiadanya keliama hal tersebut dari masyarakat (*Min Nahiyah al-adam*). Sebagai contoh jaminan kebutuhan primer yang berupa jiwa atau nyawa adalah dengan menghilangkan biaya-biaya pengobatan yang mahal bagi masyarakat miskin. Karena dengan

adanya biaya mahal yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin tersebut, masyarakat miskin tidak akan terjamin kesehatannya atau bahkan nyawanya.⁹

Hal ini sesuai dengan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Karang Timur yang memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan.

dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, sedangkan tanggung jawab masyarakat penerima PKH kurang bertanggung jawab karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Dilihat dari jaminan sosial ini PKH merupakan jaminan sosial yang diperuntukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu dengan memberikan bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok RSTM dan peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan.

⁹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.69-70

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut diatas maka kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Karang Timur guna meningkatkan angka partisipasi sekolah kurang terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena sebagian dari peserta PKH tidak tepat sasaran, dimana bantuan tetap diberikan meskipun tidak ada partisipasi di bidang pendidikan, tidak adanya partisipasi sekolah sebagian besar disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang mendukung, sehingga untuk mencapai tujuan PKH dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah kurang terlaksana dengan baik.
2. Peran PKH guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial). pemerintah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memberikan bantuan untuk kemaslahatan masyarakatnya, sedangkan tanggung jawab dari masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Dalam hal jaminan sosial (*takaful*), kesadaran pemerintah akan pendidikan dan kesehatan sudah tinggi sehingga pemerintah membuat program-program yang menjamin peningkatan kualitas SDM yang salah satu programnya adalah PKH.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebaiknya memberikan bantuan kepada RTSM yang benar-benar membutuhkan dan menjalankan kewajibanya dalam bidang pendidikan, agar dalam pelaksanaannya program ini tepat sasaran sehingga apa yang menjadi tujuan PKH akan terwujud. Program ini juga akan sangat tepat apabila di terapkan di desa yang partisipasi sekolahnya masih kurang karena himpitan biaya.
2. Untuk masyarakat, diharap dapat bekerjasama untuk mewujudkan tercapainya program ini dengan peduli akan pendidikan dan kesehatan, serta mandiri dan tidak bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah, agar kelak jika tidak mendapat bantuan lagi maka masyarakat dapat mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor Ruslan, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Al Arif M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Ali, Mohammad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2009.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, terjemahan syihabuddin, Depok: Gema Insani, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Qur'an 7*, Jakarta, Darul Haq, 2016.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014.
- Damayanti, Rika, et.al, *Pengaruh Family Psychoeducation Islamic Therapy Terhadap Beban Dan Kemampuan Keluarga Dalam Merawat Klien Gangguan Jiwa*, Bandar Lampung: Cv. TeaMs Barokah, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dieb, Musthafa, Muhyidin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauziah Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Frisdiantara, Cristea dan Imam Muklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*, Malang, Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalilia Indonesia, 2012.
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Imam Jalaludin Al-Mahalili, Iman Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, terjemahan Najib Junaidi, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Karim, Abdul, *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Penelitian Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi 4*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Labib, *Terjemah Ikhtisar Hadis Abu Daud*, Surabaya: Tiga Dua, 1996.
- Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Muda, Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004
- Nainggolan, Togiaratua, *Program Keluarga Harapan Di Indonesia*, Jakarta Timur, P3KS Press, 2012.
- Nazara, Suahasil, Sri Kusumastuti Rahayu, *Program Keluarga Harapan*, TNP2K, Oktober 2013.
- Neolaka, Amos ,Grace Amialia A Neolaka, *Landasan Pendidikan*, Depok: Kencana, 2017
- Pane, Erina, *Penguatan Peran Nazhir Di Bandar Lampung Dalam Mengelolah Potensi Wakaf Produktif Dan Kontribusinya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Bandar Lampung: lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan, 2016.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Siswosoematto, Rubijanto, et.al. *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

Siswoyo, Dwi, et.al, *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press. 2011 Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010

-----, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2015.

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sumaryadi, I Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005.

Supriadi, Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Seti, 2013

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009.

-----, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2012.

Tim Pengembang Ilmu Fip-Upi, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama, 2007

TNP2K, Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta Pusat: TNP2K, 2012.

-----, *Program Keluarga Harapan*, Artikel 2014.

Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.

Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi* Jakarta: Bumi Aksara, 2013

-----, Zainal, et.al. *The Economics of Education Mengolelolah Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendekatan Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Widianto, Bambang, *Kebijakan TNP2K Dalam Pengelolaan Data Terpadu Yang Mendukung Strategi Transformasi PKH*, Tangerang: Deputy Seswapres Bidang Sekra Dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K, 2012.

Jurnal :

Aminuddin, Faiz, Ahmad Thoyib Syir'ah, *Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan*, (JIE Volume V No. 2 Oktober 2016).

Andriany, Liesna, *Angka Partisipasi Kasar (APK) Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun* (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UISU, 2015)

Direktorat Jendral, *Anggaran Kementrian Keuangan, Kajian Program Keluarga Harapan*, (2015)

Ekardo, Apando, et.al. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Negari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume III Nomor 1, (2014).

Hasan, Nurul Fatma, *Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan*, Jurnal Studi PGMI, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2017)

Lestari, Niken Ajeng, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah*. (Tesis Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014).

Melviona, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*, Jom FISIP Vol. 4 No 2 (Oktober 2017)

Pedoman umum program keluarga harapan (PKH),

Utomo, Dedy,et.al. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Adaministrasi Publik (JAP) Vol 2, No.1. 2011.

Yudid, et.al. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, (Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik (JISIP) Vol. 3 N0.1,2014).

Web :

BPS. *Jumlah Penduduk Miskin*. (On-Line) tersedia di <http://www.bps.go.id>, (Diakses: 09 April 2018)

Dinas Sosial Salurkan PKH 15 Daerah, (On-line) Diakses di: <http://www.lampost.co> (Diakses: 22 Maret 2018)

Kemdikbud, *Sistem Informasi APK APM*, (On-Line) Tersedia Di: [Http://Apkapm.Data. Kemdikbud.Go.Id/](Http://Apkapm.Data.Kemdikbud.Go.Id/) (Diakses: 4 September 2018)

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, (On-line) Tersedia di: www.kemsos.co.id, (Diakses: 3 Juni 2018).

Mahally, Abdul Halim, *PKH Dan Masyarakat Miskin*, (On-line) Diakses: [di:https://pkh.kemsos.go.id](https://pkh.kemsos.go.id) (Diakses: 4 Juli 2018)